
EXECUTIVE SUMMARY



**PENDATAAN PENYUSUNAN DATA BASE
KELEMBAGAAN PETERNAKAN DI JAWA
BARAT PASCA OTONOMI DAERAH**



**KERJASAMA
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2006**

ORGANISASI PELAKSANA PENELITIAN

**PENDATAAN PENYUSUNAN DATA BASE
KELEMBAGAAN PETERNAKAN DI JAWA BARAT
PASCA OTONOMI DAERAH**

Nara Sumber :

Prof. Dr. Ir. Dadi Suryadi, MS.(Dekan Fakultas Peternakan UNPAD)
Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat

Pelaksana Penelitian:

Ketua:

Ir. Sri Rahayu, MS.

Anggota:

Ir. Sondi Kuswaryan, MS.
Achmad Firman, S.Pt., MSi.
Cecep Firmansyah, SPT.
Anita Fitriani, S.Pt

EXECUTIVE SUMMARY

PENDATAAN PENYUSUNAN DATA BASE KELEMBAGAAN PETERNAKAN DI JAWA BARAT PASCA OTONOMI DAERAH

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Dalam mencapai visi Jawa Barat sebagai “...*Propinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibukota Negara*”. Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah menetapkan Agribisnis sebagai salah satu “*core*” bisnisnya. Oleh karena itu, peranan sektor pertanian menjadi sangat strategis dalam pembangunan masyarakat Jawa Barat. Menurut Wachyan (2002), dalam membangun agribisnis di Jawa Barat, setidaknya sektor pertanian mempunyai empat fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Ekonomi
- b. Fungsi Ketahanan Pangan
- c. Fungsi Stabilitas Ekonomi
- d. Fungsi Kelestarian Lingkungan

Oleh karena itu, pembangunan peternakan seperti termuat dalam tujuan pertama pembangunan peternakan yaitu meningkatnya mutu dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan dalam memfasilitasi pembangunan peternakan. Begitu pentingnya peran SDM sebagai salah satu komponen pembangunan peternakan, maka kebijakan pembangunan peternakan harus dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul terkait hal tersebut. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat, perlu didukung oleh data yang tepat/akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data kelembagaan kelompok peternak khususnya kelompok peternak yang bergerak pada tingkat budidaya (*on-farm*), sarana produksi/input (*off-farm* hulu) maupun agroindustri (*off-farm hilir*).

Keberadaan data dan informasi tentang kelembagaan kelompok peternak masih relatif terbatas sehingga data tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan peternakan termasuk kelembagaan secara strategis. Data dan informasi merupakan sumber utama untuk mengetahui maju dan mudurnya suatu kegiatan. Permasalahan lain mengenai data statistik ini adalah dalam hal akurasi yang sering dipertanyakan, sehingga diperlukan kejelian dalam menggunakannya. Dalam kasus-kasus tertentu, data kelembagaan kelompok peternak atau yang terkait dengan komponen tenaga kerja di bidang peternakan tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti situasi perkembangan usaha peternakan sehingga diperlukan data dan informasi yang terus di *update* agar dinamika kelembagaan kelompok peternak tersebut dapat terus dipantau.

Selama ini, kelembagaan peternak hanya dipandang sebagai suatu objek (*target groups*) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program dari berbagai institusi, baik pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, ataupun institusi lainnya. Biasanya, kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh institusi-institusi tersebut lebih bersifat sentralistik atau *top down* dan seragam. Kegiatan yang sentralistik tersebut menyebabkan kreativitas lokal tidak dapat muncul karena telah dirancangnya kegiatan tersebut sedemikian rupa. Di samping itu, belum tentu program atau kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan peternak pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan database kelembagaan kelompok peternak bertujuan untuk membentuk sistem informasi kelembagaan kelompok peternak di Jawa Barat dengan data yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa dari lapangan. Melalui kegiatan penyusunan database ini diharapkan diperoleh data kelembagaan kelompok peternak yang valid sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan peternakan, baik bagi penyusun kebijakan publik (pemerintah) maupun stakeholder lainnya yang terkait. Selanjutnya data tersebut dapat disusun kedalam suatu sistem informasi kelembagaan, sehingga dapat di *update* setiap saat oleh pihak yang berkompeten dan menghasilkan *data series* yang dinamis.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengkaji potensi kelembagaan kelompok peternak di wilayah Propinsi Jawa Barat khususnya kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (on-farm). Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mengidentifikasi jenis dan jumlah kelembagaan kelompok peternak khususnya di bidang budidaya (on-farm) di wilayah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis;
2. Mempelajari karakteristik, permasalahan dan kendala pengembangan kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (on-farm) pada setiap wilayah kajian;
3. Mempelajari peran dan fungsi serta dinamika kelembagaan kelompok peternak;
4. Mempelajari peran/kontribusi usahatnakan terhadap pendapatan peternak anggota lembaga/kelompok;
5. Menyusun rekomendasi pengembangan kelembagaan kelompok peternak sesuai dengan kondisi kelembagaan pada setiap wilayah kajian.

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Database kelembagaan kelompok peternak di Jawa Barat khususnya kelembagaan di bidang budidaya (on-farm);
2. Profil kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (on-farm);
3. Rekomendasi pengembangan kelembagaan kelompok peternak khususnya di bidang budidaya (on-farm).

1.4 Ruang Lingkup

a. Wilayah kajian :

Wilayah kajian meliputi 13 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis.

b. Kelembagaan kelompok peternak :

Kajian/kegiatan difokuskan pada kelembagaan kelompok peternak di bidang

KERANGKA PIKIR

2.1. Pengertian

Program pengembangan agribisnis berbasis peternakan secara operasional merupakan suatu proses pembangunan melalui pengembangan wilayah berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Arah pengembangan agribisnis peternakan seharusnya sudah mengakomodir lokal spesifik dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pada awalnya pembangunan agribisnis peternakan dapat difasilitasi dan diintroduksi oleh pihak pemerintah kemudian untuk selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh masyarakat di kawasan tersebut. Sehingga kawasan agribisnis peternakan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat berbagai pertumbuhan ekonomi wilayah. Selanjutnya dalam hal ini pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan dinamisor.

Untuk membatasi penulisan kajian ini, berikut diuraikan mengenai definisi kelembagaan agribisnis, peternak, dan kelembagaan peternak sebagai berikut:

1. **Kelembagaan agribisnis** adalah lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Misalnya, lembaga pemerintah, koperasi, lembaga penelitian, dan sebagainya.
2. **Peternak** adalah pelaku usaha agribisnis yang sumber penghasilannya berasal dari pengelolaan usaha agribisnis peternakan baik usaha monokultur (peternakan saja) ataupun polikultur (terpadu dengan usaha agribisnis komoditas lainnya)
3. **Kelembagaan peternak** adalah organisasi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri yang didasari atas kesamaan kepentingan di bidang peternakan dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis.

2.2. Arah Pembangunan Kelembagaan Peternakan di Jawa Barat

Penegembangan kelembagaan peternak ditujukan untuk kemandirian dan ketangguhan kelompok peternak sebagai subyek pembangunan dan mampu mengangkat perekonomian rakyat. Pada umumnya, usaha yang dilakukan oleh kelembagaan peternak bersumber pada keterampilan yang dimiliki kelompok, modal sendiri dan seadanya. Sehingga dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan peternak diharapkan terjadi keterpaduan usaha mulai dari penanganan budidaya sampai pada pemasaran hasilnya. Oleh karena itu, upaya yang dapat ditempuh untuk pemberdayaan kelembagaan peternak tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong dan membimbing para peternak yang semula berusaha sendiri (usaha rumah tangga) agar mampu bekerjasama dibidang ekonomi secara berkelompok. Usaha tetap dijalankan di masing-masing keluarga, sedangkan aspek yang dikerjakamkan dalam kelompok seperti pengadaan sarana produksi, penjualan hasil produksi, dan upaya mendapatkan pendanaan dapat diusahakan dalam kelompok. Anggota kelompok terdiri dari para peternak yang saling mempercayai, saling kenal satu sama lain, dan mempunyai kepentingan bersama sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi.
2. Menumbuhkan gabungan kelompok yang usahanya sejenis atau sering juga disebut sebagai asosiasi, misalnya peternak ayam, domba, kambing, dan sebagainya. Tujuan dari ditumbuhkannya gabungan kelompok ini adalah untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya.

Arah dari pengembangan kelembagaan peternak adalah untuk membentuk kerjasama ekonomi dari berbagai pelaku agribisnis khususnya kelembagaan peternak. Terbentuknya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan usaha dan dapat menghasilkan nilai tambah pendapatan bagi peternak.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, maka terdapat penambahan fungsi, personil dan asset untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Hal ini memberi kewenangan dan kesempatan yang lebih untuk kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk pemantauan/monitoring kegiatan pembangunan. Demikian pula halnya di bidang peternakan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsi pemantauan/ monitoring, antara lain melalui *up-dating* informasi kondisi peternakan terkini (*existing condition*), termasuk informasi kelembagaan kelompok peternak.

Informasi kelembagaan kelompok peternak yang komprehensif, valid dan *uptodate* diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, baik bagi pemerintah maupun stakeholder lainnya yang terkait. Untuk itu perlu adanya kegiatan penyusunan database kelembagaan yang dibentuk dalam suatu sistem informasi kelembagaan kelompok peternak yang dapat diakses setiap saat oleh berbagai pihak yang memerlukan.

2.3. Prinsip Pengembangan Kelembagaan Peternak

Selama ini, dikenal 2 sifat kelembagaan peternak, yaitu kelembagaan mandiri dan kelembagaan bentukan. Kelembagaan mandiri adalah kelompok peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan dibentuk tanpa bantuan dari kelembagaan lainnya. Sedangkan kelembagaan bentukan adalah kelompok peternak yang dibentuk karena diinisiasi oleh kelembagaan lain, misalnya oleh pemerintah ataupun LSM. Biasanya kelembagaan bentukan akan terbentuk jika ada program atau kegiatan yang mengharuskan adanya pembentukan kelompok.

Kedua sifat kelembagaan tersebut mempunyai nilai positif dan negatif. Nilai positif dari kelembagaan mandiri adalah kelembagaan tersebut murni karena dibentuk secara *bottom up* atau dibentuk oleh peternak itu sendiri berdasarkan kebutuhan bersama. Selain itu, kelembagaan mandiri ini biasanya umurnya panjang atau bertahan lama karena dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama. Sedangkan nilai negatifnya adalah kelembagaan mandiri ini akan hancur bila tiap anggotanya sudah tidak lagi sejalan dengan dasar kepentingan kelompok. Nilai positif dari kelompok bentukan adalah terbentuknya kelompok difasilitasi dan mungkin didanai oleh institusi yang terkait dengan program atau kegiatan. Hanya saja, nilai negatifnya adalah umur dari kelompok bentukan tersebut biasanya tidak akan berjalan lama, paling tidak seumur program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.

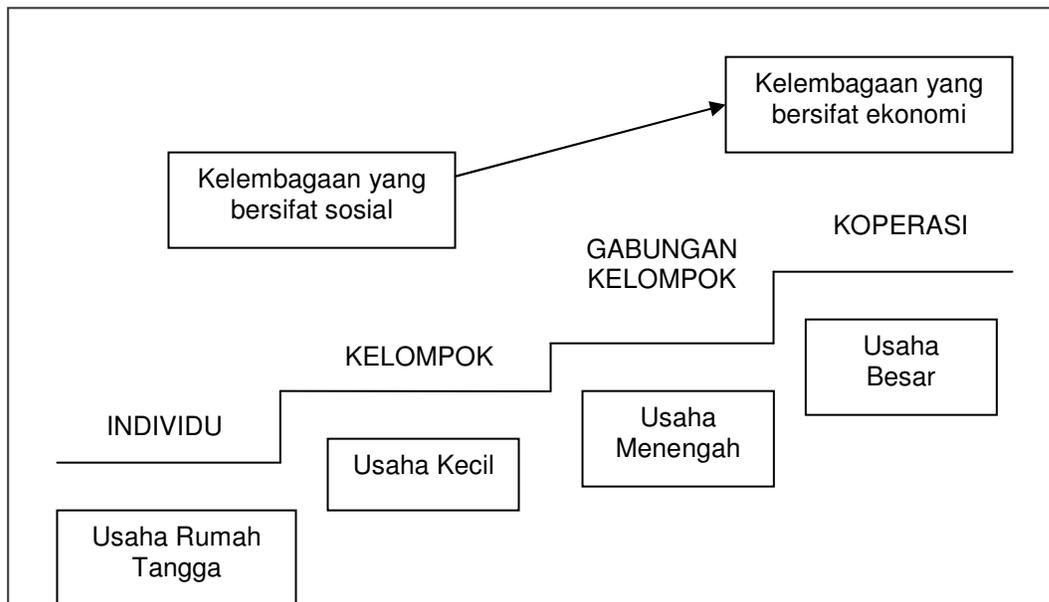
Berbagai kemudahan yang mungkin diperoleh bila dibentuk kelembagaan kelompok peternak, antara lain:

1. Dapat dengan mudah membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompok
2. Informasi dapat menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok
3. Inovasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota, baik teknologi pembibitan, pakan, budidaya, pasca produksi dan sebagainya.
4. Memudahkan dalam melakukan penyuluhan karena sudah terbentuk kelompok

5. Memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah
6. Memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal
7. Memudahkan dalam pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh kelompok

Hal-hal di atas merupakan jalan untuk membentuk kelompok yang mandiri dan tangguh. Dengan adanya ikatan yang kuat dalam kelompok, maka diharapkan kelembagaan peternak tidak hanya terbentuk dalam kelompok saja melainkan dapat ditransformasi menjadi koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM), seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Transformasi Kelembagaan dari Kelembagaan Sosial Menuju Kelembagaan Ekonomi



METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu

Kegiatan ini dilakukan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Lama kegiatan adalah 5 (lima) bulan.

3.2. Sampel Frame

Sampel/unit analisis terdiri dari lembaga/kelompok peternak dan peternak sendiri sesuai dengan komoditas ternak yang diusahakan. Metode penentuan sampel lembaga/kelompok didasarkan pada informasi kelembagaan yang masih eksis yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kab./Kota. Dari lembaga/kelompok yang eksis ini akan dipilih 1 (satu) kelompok yang masing-masing mewakili 1 (satu) komoditas ternak secara *purposive*. Penentuan 1 (satu) sampel kelompok ini didasarkan atas kondisi lembaga dan komoditas pada setiap kabupaten/kota, sehingga antar kabupaten dapat berbeda. Selanjutnya pada setiap kelompok akan dipilih 1 - 3 orang peternak dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling). Tujuan dari

pengambilan sampel peternak adalah untuk memberikan gambaran dari usaha peternakannya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan lembaga/kelompok peternak (ketua/pengurus kelompok), peternak sampel dan pihak yang terkait lainnya, seperti Dinas Peternakan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan pedoman/ kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari laporan/publikasi Dinas Peternakan Kab/Kota, laporan lembaga/kelompok peternak, serta literatur lainnya yang terkait.

3.4. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan pengolahan data untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan kepentingan studi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan statistika deskriptif (seperti mean/rataan, standar deviasi, proporsi/persentase). Analisis tersebut mencoba mendeskripsikan :

- Profil lembaga/kelompok dan usaha/kegiatan kelompok;
- Profil peternak dan usahaternak;
- Rekomendasi pengembangan lembaga/kelompok.

PEMBAHASAN

4.1. Kelembagaan Kelompok Peternak

Penyusunan data base kelompok peternak merupakan langkah awal untuk membangun kelembagaan kelompok peternak. Pemanfaatan data base kelembagaan kelompok peternak, tidak hanya diperlukan oleh dinas atau instansi pemerintah saja melainkan juga bagi stakeholder yang membutuhkan data tersebut. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan membangun data base kelompok peternak adalah sebagai berikut:

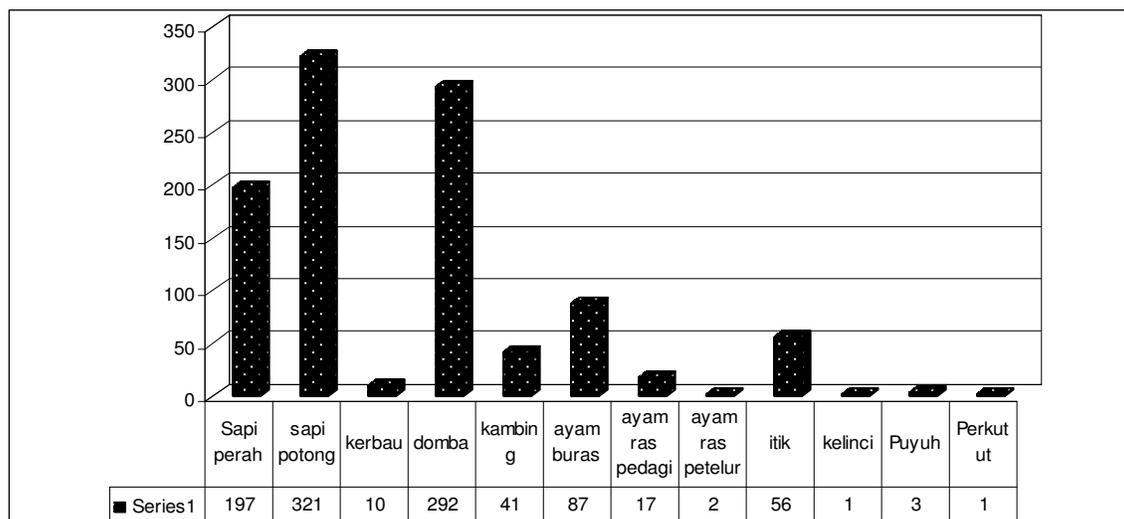
1. Teridentifikasinya kelembagaan kelompok peternak di berbagai kabupaten/kota
2. Dapat mendeteksi mana kelompok yang aktif dan tidak
3. Dapat dimanfaatkan oleh berbagai program atau kegiatan yang melibatkan kelompok peternak
4. Dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kelembagaan peternak.

Gambaran umum berdasarkan hasil survei kelembagaan kelompok peternak yang dilakukan di 13 kabupaten/kota yang berada di wilayah timur Jawa Barat, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. **Dokumentasi Data Kelembagaan Kelompok Peternak dari Dinas/Subdinas Lingkup Peternakan.** Data kelembagaan kelompok peternak yang diperoleh dari dinas/subdinas lingkup peternakan, adalah sebagai berikut:
 - a. Rata-rata kelompok peternak yang terdokumentasikan belum terupdate dengan baik atau terkoreksi berdasarkan kondisi saat ini. Hal ini disebabkan tidak dana program atau kegiatan untuk mendata kelompok-kelompok peternak di kabupaten/kota.
 - b. Kelompok-kelompok peternak yang didokumentasikan adalah kelompok peternak yang mengikuti program atau kegiatan dari dinas/subdinas lingkup

- peternakan atau dengan istilah lainnya merupakan kelompok-kelompok hasil bentukan dari dinas/subdinas lingkup peternakan.
- c. Kelompok-kelompok mandiri jarang sekali diidentifikasi karena tidak adanya informasi mengenai keberadaan kelompok peternak tersebut, kecuali bila kelompok tersebut mengunjungi dinas/subdinas lingkup peternakan untuk dilibatkan dalam program atau kegiatan dinas/subdinas.
 2. **Pembinaan.** Pembinaan kelompok peternak yang dilakukan oleh dinas/subdinas lingkup peternakan hanya dilakukan pada saat adanya program atau kegiatan, sedangkan bila program atau kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan maka tidak ada lagi pembinaan.
 3. **Dokumentasi Kelembagaan Peternak dari Koperasi Persusuan.** Data kelembagaan kelompok peternak yang diperoleh dari Koperasi Persusuan lebih *up to date* dengan baik karena pihak koperasi mempunyai kepentingan dengan kelompok-kelompok peternak tersebut, terutama dalam hal distribusi susu, pembayaran hasil penjualan susu, pembinaan dan penyuluhan, penyaluran sarana produksi peternakan, dan sebagainya. Kelompok-kelompok peternak sapi perah yang terbentuk, biasanya di bagi dalam bentuk wilayah-wilayah untuk memudahkan dalam koordinasi.
 4. **Kelembagaan Kelompok Peternak di Daerah Perkotaan.** Kelompok peternak yang berada di daerah perkotaan umumnya relatif sedikit yang terdokumentasikan dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Usaha yang dilakukan biasanya adalah usaha budidaya yang mengarah penggemukan, seperti domba, kambing, dan sapi potong. Di daerah perkotaan belum ada kelompok yang mengarah pada usaha pengolahan komoditas peternakan.
 5. **Eksistensi Kelompok Peternak.** Eksistensi kelompok peternak sering kali dikaitkan dengan usaha yang mereka geluti. Keberadaan kelompok peternak sangat terkait dengan usaha peternakan yang mereka usahakan. Secara umum, kelompok peternak yang lebih eksis dilihat dari usaha peternakan yang diusahakannya adalah kelompok peternak sapi perah dan sapi potong (khususnya kelompok peternak yang berada dalam satu kawasan). Eksistensi kelompok peternak sapi perah sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kelompok peternak sapi perah sudah sejak lama eksis dalam usaha peternakannya karena usaha ini bersifat vertikal, bersifat oligopoli, dan produk yang dihasilkannya sama, yaitu susu. Sedangkan kelompok peternak sapi potong lebih cenderung eksis pada kelompok usaha sapi potong perbibitan dan penggemukan yang berada dalam satu hamparan atau kawasan. Hal ini sangat terkait erat dengan pengelolaan usahanya, karena bila usaha tersebut dalam satu kawasan akan memudahkan dalam berbagai hal, seperti koordinasi, penyuluhan, penyaluran bibit, penjual hasil, dan sebagainya.
 6. **Jumlah Keanggotaan.** Jumlah anggota kelompok peternak berdasarkan hasil survei sangat beragam dengan kisaran 5 – 70 orang dalam satu kelompok. Jumlah besar kecil anggota kelompok akan berdampak pada pengelolaan kelompok. Jumlah anggota yang lebih kecil akan lebih mudah mengelolanya dibandingkan dengan kelompok dalam jumlah besar. Beberapa literatur merekomendasikan bahwa jumlah anggota kelompok yang ideal sebanyak 20 – 25 orang per kelompok. Hal ini berkaitan erat dengan keberlanjutan kelompok tersebut di mana bila kelompok tersebut aktif maka dapat ditransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro atau membentuk wadah koperasi.
 7. **Status Kelembagaan Kelompok Peternak.** Secara umum kelembagaan kelompok peternak masih berstatus kelompok peternak pemula. Hanya sedikit sekali kelompok yang sudah berstatus madya dan lanjut.

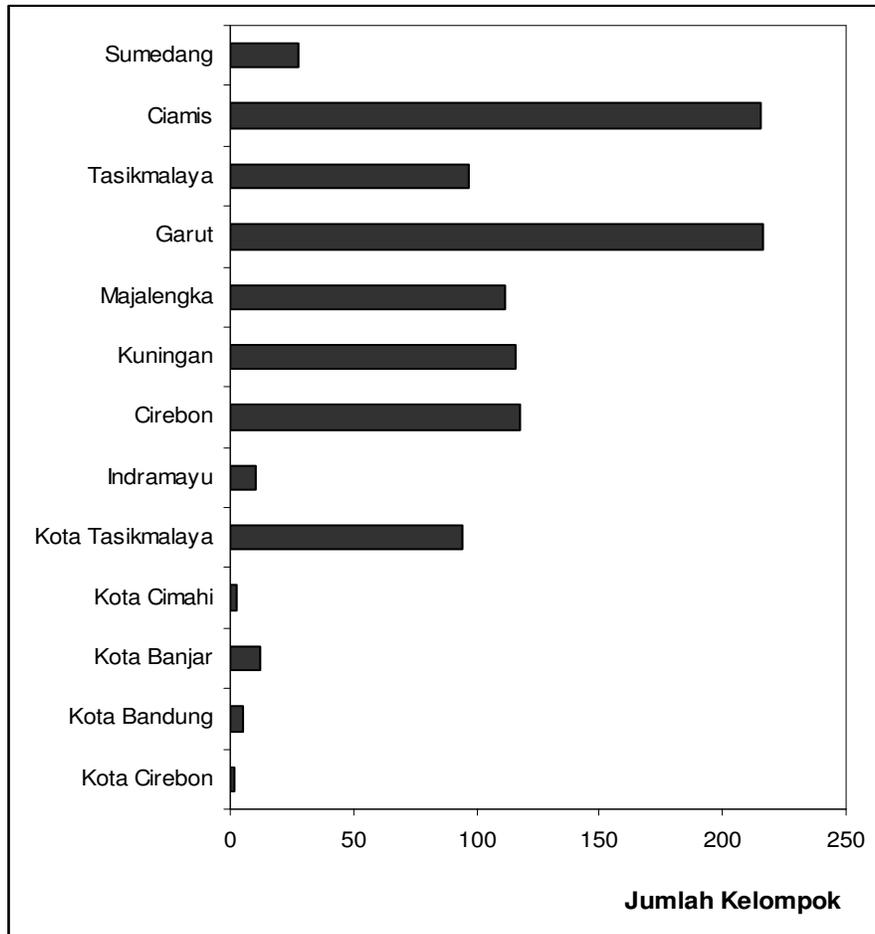
Hasil identifikasi terhadap kelembagaan kelompok peternak di 13 kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat 1.028 kelompok peternak dari berbagai komoditas peternakan yang diusahakannya. Berdasarkan Gambar 4.2, kelembagaan kelompok peternak sapi potong lebih mendominasi dibandingkan dengan kelompok kelembagaan lainnya, yaitu sebanyak 321 kelompok (31,2%). Sedangkan kelompok peternak domba menempati urutan ke dua dengan jumlah 292 kelompok (28,4%) dan kelompok peternak sapi perah menempati urutan ke tiga sebanyak 197 kelompok (19,2%). Sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok peternak percutut yang hanya satu kelompok. Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan bahwa wilayah timur Jawa Barat lebih didominasi oleh kelompok peternak sapi potong, sapi perah dan domba. Hal ini berarti komoditas peternakan tersebut lebih banyak diminati oleh masyarakat wilayah timur Jawa Barat sebagai salah satu usaha.



Gambar 4.2. Kelembagaan Kelompok Peternak dengan Berbagai Komoditas Peternakan yang Diusahakan

Bila kita lihat dari tiap kabupaten/kota, kelembagaan kelompok peternak pada masing-masing wilayah mempunyai jumlah kelompok peternak yang berbeda-beda. Rata-rata untuk wilayah perkotaan, jumlah kelompok peternaknya lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah kabupaten, kecuali Kota Tasikmalaya yang mempunyai jumlah kelompok peternak sebanyak 94 kelompok (lihat Gambar 4.3). Hal tersebut dapat dimungkinkan karena sebagian besar wilayah di Kota Tasikmalaya masih berstatus perdesaan sehingga wajar masih terdapat banyak kelompok peternak.

Jumlah kelompok peternak di Kabupaten Garut lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sebanyak 216 kelompok. Kelompok peternak yang mendominasi di Kabupaten Garut adalah kelompok peternak sapi perah, disusul oleh kelompok peternak domba dan ayam buras. Sedangkan Kabupaten Ciamis, jumlah kelompok peternaknya sebanyak 215 kelompok. Dominasi kelompok peternak cenderung pada kelompok peternak sapi potong dan domba. Adapun kabupaten/kota yang memiliki jumlah kelompok peternak paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya adalah Kota Cirebon, yaitu hanya terdapat 2 kelompok peternak saja.



Gambar 4.3. Jumlah Kelembagaan Kelompok pada Masing-masing Kabupaten/Kota

Potensi kelompok peternak seperti yang telah ditampilkan di atas, mengindikasikan bahwa masih terbukanya peluang bagi pengembangan kelembagaan kelompok peternak di masa depan. Hanya saja, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan kelompok peternak adalah harus dilakukan pendataan ulang terhadap kelompok-kelompok peternak yang berada di wilayah masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui mana saja kelompok yang masih eksis atau tidak. Di samping itu, pendataan tersebut dapat mengetahui kelompok mana saja yang sudah berkembang lebih maju dari pada sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus jika kelembagaan kelompok ini sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan peternakan. Peternakan berbasis kelompok peternak sangat berguna bagi pembangunan peternakan di masa depan karena berbagai kemudahan akan diperoleh dengan cara berkelompok. Namun, yang perlu diingat adalah basis pembentukan kelompok harus atas dasar keinginan bersama para anggota kelompok melalui musyawarah dan mufakat.

4.2. Kondisi Usaha Peternakan

Telah banyak berbagai penelitian yang telah mengungkapkan berbagai usaha dari komoditas peternakan, baik dari sisi budidaya ataupun dari sisi ekonomi dan

manajemen pengelolaan ternak. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak dilakukan di usaha peternakan rakyat. Satu hal yang sangat menonjol dari usaha peternakan rakyat ini adalah skala kepemilikan ternak yang relatif kecil. Di bawah ini akan diuraikan berbagai kondisi usaha peternakan secara umum yang dilakukan oleh beberapa peternak di daerah survei adalah sebagai berikut:

A. Usaha Beternak Sapi Perah

Saat ini sebagian besar usaha peternakan sapi perah dikelola oleh peternak sapi perah rakyat dengan skala usaha yang tidak ekonomis. Berdasarkan beberapa hasil penelitian di Jawa Barat, skala usaha peternak sapi perah adalah sekitar 5,8 ekor per unit usaha dengan kemampuan produksi sekitar 11,6 liter/ekor/hari (Chai, dkk, 1996). Sedangkan menurut Makin (1998) rata-rata kemampuan produksi susu di Jawa Barat sekitar 8,20 kg/ekor/hari dengan skala usaha 3,3 ekor/peternak .

Produksi susu hasil peternakan rakyat sebagian besar disalurkan ke Koperasi /KUD persusuan yang kemudian di pasarkan kepada Industri Pengolah Susu. Koperasi memberikan pelayanan kepada peternak sebagai anggotanya, berupa pemasaran hasil produksinya juga melayani kebutuhan konsentrat, obat-obatan, IB dan memberikan fasilitas penyaluran kredit.

Pada kenyataannya usaha peternakan sapi perah rakyat ini dihadapkan dalam dua masalah besar, yaitu masalah *zooteknik* dalam menghadapi pasar global serta masalah kelembagaan sosial ekonomi yang kurang mendukung terhadap kinerja usahanya. Kedua aspek tersebut, seperti lingkaran setan yang saling berkaitan sehingga mengakibatkan perkembangan usaha peternakan rakyat dalam kurun waktu dua puluh tahun ini seperti jalan di tempat.

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para peternak sapi perah di Jawa Barat menurut Makin (1998) dan Dadi Suryadi Dkk (2002) yaitu :

1. Masih rendahnya produktivitas sapi perah yang dipelihara peternak, karena mutu genetik (bibit) sapi perah yang rendah, juga karena manajemen budidaya ternak dan kualitas pakan yang diberikan tidak memadai. Perbaikan kualitas sumberdaya peternak relatif lebih mudah ditingkatkan melalui pembinaan dan penyuluhan yang intensif. Tetapi yang menjadi problema cukup kompleks adalah bagaimana menyediakan stok bibit yang baik dan bahan pakan yang berkualitas dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan di daerah pengembangan.
2. Rendahnya kualitas susu antara lain ditunjukkan oleh tingginya kandungan kuman sekitar rata-rata di atas 10 juta/cc, yang diakibatkan oleh sistem manajemen kandang yang tradisional, sehingga harga yang terbentuk pun menjadi rendah.
3. Sapi perah sangat tergantung pada ketersediaan lahan sebagai penghasil pakan. Realitanya, lahan produktif bagi kepentingan peternakan sapi perah semakin terdesak oleh kebutuhan sektor lainnya.
4. Rataan jumlah pemilikan ternak yang tidak efisien (2-3 ekor/peternak), sehingga kurang menjanjikan keuntungan bagi peternak. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri untuk meningkatkan skala usahanya, agar usaha peternak menjadi efisien. Sedangkan dilain pihak ketersediaan bibit (*replacement stock*) belum mampu disediakan sesuai dengan kebutuhan peternak saat ini.
5. Semakin langkanya sumberdaya manusia berupa tenaga kerja muda yang berusaha di bidang peternakan sapi perah. Hal ini sebagai dampak dari pergeseran orientasi pembangunan yang mengarah ke sektor jasa dan industri.

6. Belum terjadinya integrasi dan koordinasi yang harmonis antar lembaga pemerintah, swasta, koperasi dan peternak, sehingga berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kurang diantisipasi oleh para pelaku bisnis.
Dalam menghadapi pasar bebas, usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut perlu segera dilakukan dan dikaji secara komprehensif tidak saja dari sisi peternak (on farm) dan kelembagaan pada sub sistem lainnya (sub sistem off farm maupun sub sistem pendukung) tetapi juga dari aspek kebijakan persusuan maupun UU Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6/1967.

Secara umum, hasil survei yang dilakukan di Majalengka, Kuningan, dan Sumedang terhadap usaha kelompok peternak sapi perah menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan ternak antara 1 – 3 ekor sapi laktasi
2. Merupakan usaha pokok dari peternak di samping ada usaha lainnya yang menopang kehidupan peternak, misalnya bertani.
3. Sumber daya manusia untuk membantu usaha peternakannya berasal dari keluarga.

B. Usaha Sapi Potong

Usaha peternakan sapi potong di Jawa Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut : (a) Usaha sapi potong sambilan yang dikelola oleh masyarakat petani/ peternak yang disebut pula sebagai peternakan rakyat, dan (b) Industri peternakan sapi potong penggemukan yang dikelola oleh perusahaan peternakan disebut sebagai Feedlotter. Komersialisasi usaha yang berbeda dari kedua tipe usaha tersebut menghasilkan karakteristik budidaya ternak dan hasil produksi yang berbeda pula.

Peternakan rakyat menjadikan usaha ternak sapi potong sebagai tabungan, ataupun alat bantu tenaga kerja para petani peternak dalam mengolah lahan usahanya. Adapun perusahaan peternakan sapi potong atau industri peternakan sapi potong, memelihara sapi potong dengan tujuan untuk memperoleh pertambahan berat badan yang menguntungkan melalui kegiatan penggemukan. Peternakan sapi potong rakyat, yang merupakan usaha sambilan dengan skala kepemilikan 1-2 ekor per peternak biasanya dikelola dengan sangat sederhana, memanfaatkan rumput lapangan ataupun limbah pertanian seperti jerami padi sebagai sumber hijauan pakannya, serta menggunakan sapi potong lokal sebagai bakalan. Adapun industri sapi potong dengan skala kepemilikan ribuan ekor dikelola secara profesional, menggunakan kombinasi konsentrat dan hijauan pakan dalam ransumnya dan menggunakan sapi bakalan impor mempunyai potensi genetik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sapi penghasil daging yang berkualitas.

Peternakan sapi potong rakyat di Jawa Barat tersebar di wilayah-wilayah yang dikembangkan menjadi kawasan andalan untuk komoditas sapi potong yaitu di bagian Selatan Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Bogor dan Sukabumi. Pada beberapa wilayah terdapat koperasi yang bergerak di bidang peternakan sapi potong, antara lain : Koperasi Rukun Batik di Ciamis dan Koperasi Agri Bisnis Panca Makmur di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung. Sementara itu untuk industri peternakan sapi potong, saat ini tercatat sebanyak 12 perusahaan penggemukan sapi potong yang bergerak di bidang budidaya sapi potong di Jawa Barat.

Hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Cirebon dan Indramayu terhadap usaha peternakan sapi potong adalah sebagai berikut:

1. Usaha ternak sapi potong oleh peternak tidak hanya melakukan penggemukan melainkan usaha perbibitan

2. Skala kepemilikan masih relatif kecil
3. Usaha ini masih merupakan usaha sampingan

C. Usaha Beternak Domba

Salah satu potensi plasma nutfah bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat adalah domba Priangan. Domba Priangan merupakan domba lokal yang di kelompokkan kedalam kelompok medium sedangkan dilihat dari aspek reproduksi, Domba Priangan dikenal memiliki sifat prolific yang sangat baik. Eksistensi domba Priangan sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat karena ditinjau dari aspek sosioekonomi ternak ini memiliki nilai yang sangat penting misalnya dalam kebiasaan adu ketangkasan/kesenian domba tangkas. Namun demikian di sisi lain nilai tambah Domba Priangan sebagai sumber protein hewani dalam ruang lingkup nasional tidaklah begitu baik. Dua hal yang diduga menjadi kendala utama yaitu aspek produktivitas dan pengembangan agribisnis ternak domba itu sendiri.

Budidaya ternak domba di Jawa Barat sudah merupakan tradisi masyarakat yang berkembang sejak lama. Selama ini, orientasi budidaya ternak domba hanya sebagai usaha sampingan saja dan belum berorientasi pada usaha pokok peternak. Beberapa motif usaha yang dilakukan oleh para peternak antara lain memelihara domba sebagai tabungan, yakni bila mereka membutuhkan dana maka domba tersebut dijual. Ada juga yang bermotif untuk kesenangan dan perlombaan yakni Domba Garut Aduan. Para peternak domba aduan ini sangat cermat memelihara dombanya dan biasanya yang dipelihara adalah domba jantan.

Berdasarkan pola beternak tersebut di atas, secara otomatis perkembangan populasi ternak domba di Jawa Barat peningkatannya tidak begitu menggembirakan. Perkembangan populasi ternak domba dari Tahun 1999 – 2000 hanya sebesar 4,4 persen (Dinas Peternakan Jawa Barat, 2000). Berdasarkan laporan dari Dinas Peternakan Jawa Barat (2000) jumlah pemotongan ternak domba mencapai 1.018.282. Jumlah permintaan pemotongan ternak domba tersebut digunakan untuk Idul Adha, untuk konsumen pedagang sate, rumah makan, dan konsumsi rumah tangga.

Hasil survei yang dilakukan di daerah Garut dan Indramayu terhadap usaha domba adalah sebagai berikut:

1. Skala kepemilikan domba relatif kecil
2. Masih menjadi usaha sampingan
3. Belum adanya orientasi peternak yang mengarah pada pasar

D. Usaha Beternak Kambing

Kambing merupakan salah satu komoditas peternakan yang cukup digemari oleh beberapa kalangan khususnya, orang-orang keturunan arab, pedagang sate, dan gulai. Konsumen daging kambing kebanyakan berada di daerah Ibu Kota Jakarta. Potensi inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para peternak kambing di wilayah Jawa Barat untuk mensuplai hasil produksinya ke daerah Ibu Kota Jakarta.

Hasil survei yang dilakukan di Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya terhadap usaha peternak kambing adalah sebagai berikut:

1. Usaha ini masih merupakan usaha sampingan para peternak
2. Skala usaha masih relatif kecil
3. Tenaga kerja berasal dari keluarga peternak

E. Usaha Beternak Ayam Buras

Ayam buras merupakan ayam lokal asli Indonesia. Banyak ragam dan ciri dari ayam buras ini, khususnya dari bentuk tubuh, bulu, dan suara. Beberapa ayam buras lokal Indonesia yang dapat dikenali saat ini, misalnya ayam nunukan, ayam pelung, ayam sentul, ayam kedu, dan sebagainya. Setiap jenis ayam tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehubungan dengan daerah survei adalah di Kabupaten Ciamis yang merupakan asal daerah dari Ayam Sentul, maka berikut ini disampaikan beberapa hal yang berkaitan usaha peternak Ayam Sentul sebagai berikut:

1. Usaha peternakan Ayam Sentul sedang digalakkan kembali oleh Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis karena sebagai plasma nutfah.
2. Usaha beternak Ayam Sentul belum menjadi usaha pokok peternak
3. Para peternak yang dibentuk oleh Dinas Peternakan belum sepenuhnya memahami usaha Ayam Sentul
4. Hambatan usaha beternak Ayam Sentul adalah adanya dampak flu burung sehingga para peternak tidak bergairah untuk memelihara unggas.

F. Usaha Beternak Itik

Salah satu komoditas peternakan yang mulai digemari masyarakat akhir-akhir ini adalah beternak itik. Perkembangan ternak itik tidak terlepas dari adanya pasar daging dan telur itik yang mulai dikonsumsi masyarakat. Telur itik sudah lama menjadi makanan yang cukup baik, khususnya sebagai makanan kesehatan dan biasanya disajikan dengan jamu atau dikonsumsi langsung. Sedangkan daging itik, sekarang ini banyak digemari masyarakat terutama itik-itik muda yang dijual di warteg-warteg (warung tegal). Animo masyarakat terhadap konsumsi daging dan telur ini bisa menjadi stimulus bagi perkembangan budidaya itik.

Hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Cirebon terhadap peternak itik, khususnya peternak itik petelur dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Di daerah Cirebon, para peternak itik sudah menganggap beternak itik adalah sebagai usaha pokok
2. Sistem penjualan itik dilakukan di kelompok, yaitu dengan mengumpulkan telur di kelompok di mana telur yang dikumpulkan akan didistribusikan ke berbagai daerah.
3. Para anggota kelompok akan dibayar hasil produksi itiknya sesuai harga produsen
4. Rata-rata penjualan telur itik di Kelompok Sari Sejahtera sebanyak 10.000 telur perhari.

Bila pasokan telur kurang, maka kelompok tersebut mencari telur itik dari

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelembagaan kelompok peternak dalam rangka penyusunan data base kelembagaan peternak, maka dapat disimpulkan dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pendataan Ulang Kelompok Peternak yang Menjadi Binaan Dinas/Subdinas Lingkup Peternakan.** Pendataan ulang kelembagaan kelompok peternak sangat penting dilakukan dalam rangka perbaikan kelompok dan mendata eksistensi dari kelompok itu sendiri.
2. **Seleksi Kelembagaan Peternak.** Hasil data base kelembagaan peternak dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi kelompok peternak mana saja yang memiliki kemampuan untuk berkembang atau maju.

3. **Perubahan Paradigma Statis di Kelompok.** Posisi tawar peternak relatif lebih rendah dibandingkan pedagang. Kegiatan pemasaran secara umum memperoleh porsi nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah yang dinikmati peternak. Kondisi ini sering menjadi tidak kondusif, dimana harga produk yang diterima peternak tidak memberikan stimulan bagi proses produksi selanjutnya. Dengan data base kelembagaan ini, kita dapat mengubah paradigma kelompok peternak agar meningkatkan usaha beternaknya menuju orientasi pasar.
4. **Pemberdayaan Kelompok.** Secara konseptual pemberdayaan masyarakat pertanian cakupannya dapat dipersempit menjadi pemberdayaan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini mencakup pemberdayaan masyarakat agribisnis maupun pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan kelompok usaha. Berdasarkan pengertian di atas titik tolak pemberdayaan peternak adalah pengembangan potensi yang dimiliki peternak supaya masyarakat mampu secara mandiri untuk menopang hidupnya. Oleh karena itu harus melibatkan sejumlah sumberdaya yang dikuasai masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi/usaha secara mandiri dengan posisi tawar yang cukup. Makin besar sumberdaya dikuasai masyarakat peternak, proses pemberdayaan mempunyai peluang yang makin besar untuk sampai pada tujuan pemberdayaan.
5. **Transformasi Kelompok Menjadi Koperasi atau LKM.** Dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasai peternak, modal merupakan faktor produksi yang paling lemah. Dengan demikian penguatan modal usaha kelompok akan sangat bermakna menjadi pemantik bagi berlangsungnya kegiatan agribisnis peternakan. Banyak faktor yang akan menjadi terbangkitkan dengan ketersediaan modal. Kegiatan usahaternak akan berjalan karena sumberdaya tenaga kerja atau sumberdaya lainnya yang dikuasai peternak akan berkombinasi dengan faktor produksi modal yang dikuasai peternak, membentuk aktivitas usaha yang produktif. Dengan adanya aktivitas kelompok yang semakin berkembang, bertambahnya modal kelompok, dan bertambahnya jumlah anggota kelompok, maka secara otomatis kelembagaan kelompok tersebut dapat ditransformasi menjadi lembaga koperasi atau lembaga keuangan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Badan Agribisnis Departemen Pertanian,. 1998. Kemitraan : Kebijakan dan Penjelasan Pola Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2003. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Umum Penyusunan Kegiatan Proyek Pembangunan Pertanian Tahun 2002. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2003. Petunjuk Teknis Bagian Proyek Pengembangan Sarana dan Prasarana Agribisnis Peternakan Jawa Barat T.A 2003. Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Bandung

- Dinas Peternakan. 2003. Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Jawa Barat. Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Bandung
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. 1998. Materi Pembinaan Kemitraan Usaha Pengolahan hasil Peternakan. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.
- Gittinger, P. 1982. Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian. Edisi Kedua. Penerbit UI Press. Jakarta.
- Haeruman, H.J.S. 1997. Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa: Kearah Integrasi Perekonomian Kota-Desa. Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Perdesaan Indonesia. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Kadariah, Lien Karlina, dan Clive Gray. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Edisi Ketiga. LP3ES. Jakarta
- Soetrisno L. 1995. Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan Indonesia. Makalah Seminar Internasional Strategi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis di Indonesia: Refleksi dan Aktualisasi 40 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sri Rahayu, Sondi Kuswaryan, dan Achmad Firman. 2003. Kelayakan Ekonomi Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong dalam Upaya Penghematan Devisa Impor. Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran. Bandung
- Sulistyo dan Sri R. 1994. Potensi dan Prospek Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam Mubyarto "Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal". Aditya Media. Yogyakarta.
- Suryadi, D. 1993. Potensi Ekonomi Ternak Ayam Petelur Jantan Sebagai Alternatif Sumber Usahaternak Penghasil Daging. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.